



Akuntabilitas dan Transparansi LKPD Berpengaruh terhadap kasus korupsi: benarkah?

Warkini*

Icuk Rangga Bawono

Yanuar E Restianto

Universitas Jenderal Soedirman

*email: warkini.bae@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted with the aim to determine the effect of audit opinion, the government's internal control system, and transparency of local government financial reports on corruption cases in the region. The population in this study covers all districts and cities in Indonesia in 2016, 2017 and 2018, namely 1.542 local governments. The sample used was taken based on the purposive sampling method with a total of 384 districts/cities. Then, the data analysis used is logistic regression analysis with SPSS program version 23.0. The result showed that (1) the audit opinion does not affect the corruption cases in the region. (2) The government internal control system has no effect on the corruption cases in the region. (3) The transparency of regional government financial statements does not affect the corruption cases in the regions.

INFO ARTIKEL

Diterima: 30 Juni 2020

Direview: 23 Juli 2020

Disetujui: 12 Oktober 2020

Terbit: 10 Maret 2021

Keywords:

Audit Opinion, Government Internal Control System, Transparency, Local Government Financial Statements, Corruption

PENDAHULUAN

Korupsi bukan merupakan hal yang asing terjadi pada masyarakat umum. Menurut data *Indonesian Corruption Watch* (ICW) ribuan kasus korupsi terjadi sepanjang 15 tahun terakhir terhitung dari tahun 2001-2016 (www.sindonews.com). Tahun 2018 menjadi titik puncak banyaknya kasus korupsi yang berhasil diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). Setidaknya terdapat 29 OTT KPK sepanjang tahun 2018 dan berhasil menangkap 29 pejabat daerah serta 79 tersangka lainnya yang mencakup swasta, eksekutif dan legislatif (www.beritagar.id). Beberapa pejabat daerah yang berhasil ditangkap tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar kepala daerah korupsi tahun 2018

No	Nama Kepala Daerah (Partai)	Kabupaten/ Kota	Opini Audit	No	Nama Kepala Daerah (Partai)	Kabupaten /Kota	Opini Audit
1	Abdul Latif (Partai Berkarya)	Hulu Sungai Tengah	WTP	11	Zainudin Hasan (PAN)	Lampung Selatan	WTP
2	Nyono Suharli (Partai Golkar)	Jombang	WTP	12	Setiyono (Partai Golkar)	Pasuruan	WTP

No	Nama Kepala Daerah (Partai)	Kabupaten/ Kota	Opini Audit	No	Nama Kepala Daerah (Partai)	Kabupaten /Kota	Opini Audit
3	Marianus Sae (PDIP-PKB)	Ngada	WTP	13	Neneng Hassanah Yasin (Partai Golkar)	Bekasi	WTP
4	Imas Aryuningsih (Partai Golkar)	Subang	WTP	14	Sunjaya Purwadisastra (PDIP)	Cirebon	WTP
5	Mustafa (Nasdem)	Lampung Tengah	WTP	15	Remigo Yolanda Berutu (Demokrat)	Pakpak Bharat	WDP
6	Adiyatma Dwi Putra (PAN)	Kendari	WTP	16	Irvan Rivano M (Nasdem)	Cianjur	WDP
7	Abu Bakar (PDIP)	Bandung Barat	WDP	17	Ahmad Marzuki (PDIP)	Jepara	WTP
8	Dirwan Mahmud (Perindo)	Bengkulu Selatan	WDP	18	Rendra Kresna (Nasdem)	Malang	WTP
9	Agus Feisal Hidayat (PDIP)	Buton Selatan	WTP	19	Mustofa Kamal P (PDIP)	Mojokerto	WTP
10	Tasdi (PDIP)	Purbalingga	WTP	20	Dll.		

Sumber: Kompas.com (2018)

Berdasarkan data Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), kerugian negara yang ditanggung pemerintah daerah mencapai 2,19 triliun atau 73 persen dari total kerugian negara. Korupsi mengkhianati kepercayaan masyarakat (prinsipal) terhadap pemerintah (agen) dengan tidak menjalankan tanggung jawab sebagaimana mestinya. Hingga akhirnya masyarakatlah yang menerima konsekuensi terbesar akibat dari maraknya kasus korupsi yang terjadi. Data ICW tahun 2017 menyebutkan korupsi di daerah telah menyebabkan buruknya kualitas pelayanan publik, khususnya pada sektor pendidikan, transportasi, dan kesehatan (www.republika.co.id).

Tuntutan akan akuntabilitas terhadap penyelenggaraan pemerintahan semakin meluas seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah. Scott (1997) menyebutkan keberlangsungan organisasi ditentukan oleh bagaimana organisasi tersebut dalam menciptakan informasi yang terbuka, seimbang, dan merata bagi semua pihak. Setiawan (2012) juga menyebutkan Akuntabilitas menjadi sesuatu yang penting berkaitannya dengan keberlangsungan pemerintah daerah dan pertanggungjawaban pemerintah daerah (agen) terhadap masyarakat (prinsipal). Akuntabilitas berperan dalam pengawasan atas kinerja pemerintah daerah, sehingga jalannya pemerintah dapat berlangsung baik.

Mardiasmo (2010) menyebutkan salah satu dimensi akuntabilitas publik yang utama adalah akuntabilitas keuangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan, di mana di dalamnya mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Laporan keuangan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah nantinya akan diaudit oleh BPK RI untuk menilai tingkat akuntabilitasnya. Hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diantaranya memuat opini audit, sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Opini audit berfungsi sebagai perwujudan wajar atau tidaknya pengelolaan keuangan yang

telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan digunakan sebagai sarana untuk menilai akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.

Tabel 2. Perkembangan opini audit pemerintah daerah 2014-2018

Opini	2014	2015	2016	2017	2018
WTP	47%	58%	70%	76%	82%
WDP	46%	36%	26%	21%	16%
TMP	6%	5%	4%	3%	2%
TW	1%	1%	0%	0%	0%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: IHPS I tahun 2019 BPK RI (2019)

Tabel 2 menunjukkan setiap tahun daerah yang menerima opini WTP semakin meningkat dan di sisi lain yang mendapat opini WDP, opini TMP, dan opini TW semakin menurun. Bahkan di tahun 2016, 2017, dan 2018 sudah tidak ada lagi pemerintah daerah yang mendapat opini TW. Namun, semakin banyak laporan keuangan yang memperoleh opini WTP yang sejalan dengan semakin banyak pula praktik korupsi di daerah, menimbulkan keresahan di masyarakat (www.kompas.com). Kondisi tersebut bertentangan dengan harapan masyarakat yang tinggi terhadap pencapaian opini yang telah didapatkan pemerintah daerah. Masih ditemukannya kasus korupsi pada pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP memunculkan pertanyaan baru apakah benar korupsi dan opini audit memiliki keterkaitan atau keduanya merupakan dua sisi yang berlainan.

Banyaknya kasus korupsi yang terjadi pada sektor pemerintahan salah satu penyebabnya karena masih rendah dan belum efektifnya sistem pengawasan yang dilakukan (www.tirto.id). Sistem pengendalian intern pemerintah berfungsi sebagai alat pengawasan pimpinan pusat terhadap pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya agar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Petrovits *et al.*, (2011) menyebutkan lemahnya pengendalian intern merupakan penyebab utama terjadinya kecurangan (*fraud*). Kecurangan adalah unsur utama perbuatan korupsi.

Korupsi di Indonesia terjadi bukan hanya terkait dengan penggunaan dana, tetapi banyak kasus yang mengungkapkan terjadi sejak perencanaan. Transparansi anggaran adalah aspek fundamental dalam mengupayakan sistem keuangan yang benar (www.satuharapan.com). Ketertutupan dalam pengelolaan anggaran adalah sumber manipulasi dan korupsi. Salle (2016) menyebutkan transparansi dalam pengelolaan keuangan dianggap penting mengingat masyarakat (prinsipal) memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan dan penggunaan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah (agen).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas tentang kasus korupsi di daerah. Penelitian Setiawan (2012), Masyitoh *et al.*, (2015), dan Heriningsih dan Marita (2013) menyatakan bahwa opini audit laporan keuangan berpengaruh negatif terhadap kasus korupsi. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2009) serta Khairudin dan Erlanda (2016) menyatakan hasil yang berlawanan bahwa akuntabilitas yang diproksikan dengan opini audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kasus korupsi. Selanjutnya untuk variabel sistem pengendalian intern pemerintah penelitian Nurhasanah (2016) dan Ge *et al.*, (2014) menyatakan bahwa efektivitas pengendalian intern berpengaruh dalam menurunkan kasus korupsi. Namun, bertentangan dengan penelitian Masyitoh *et al.*, (2015) dan Nugroho (2016) yang menyatakan bahwa efektivitas pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap kasus korupsi. Terkait variabel transparansi, penelitian yang dilakukan oleh Khairudin dan Erlanda (2016), Aminah dan Tarmizi (2013), serta Sitorus dan Rahayu (2018) menyatakan transparansi laporan keuangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kasus korupsi. Hasil penelitian tersebut berlawanan dengan penelitian Brusca *et al.*, (2018) serta Vadlamannati dan Cooray (2016).

Berdasarkan latar belakang tersebut maka tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk menguji

dan menganalisis apakah opini audit berpengaruh terhadap kasus korupsi di daerah. Kedua, untuk menguji dan menganalisis apakah sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kasus korupsi di daerah. Ketiga, untuk menguji dan menganalisis apakah transparansi LKPD berpengaruh terhadap kasus korupsi di daerah.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Utilitarianisme

Teori utilitarianisme merupakan teori tentang motivasi individu dalam bertindak yang didasarkan pada pertimbangan manfaat yang akan diterima dan pengorbanan yang telah dilakukan (Khair, 2014). Berkaitan dengan penelitian ini individu yang dimaksudkan adalah para kepala daerah yang melakukan tindakan korupsi. Menurut Khair (2014) terdapat tiga hal penting yang ada dalam teori utilitarianisme. Pertama, akibat atau konsekuensi dari suatu tindakan dijadikan acuan untuk menilai apakah suatu tindakan dinilai baik atau buruk. Kedua, hal terpenting untuk menilai akibat atau konsekuensi dari suatu tindakan adalah manfaat yang diterima dan pengorbanan yang dilakukan untuk tindakan tersebut. Tindakan yang benar adalah apabila pengorbanan lebih kecil dibandingkan dengan manfaat yang dihasilkan dari tindakan yang dilakukan. Ketiga, kebahagiaan seseorang tidak boleh dianggap lebih penting dari kebahagiaan orang lain.

Jika dilihat pada kenyataannya, teori utilitarianisme pada lembaga pemerintahan telah diterapkan oleh pihak-pihak yang melakukan tindakan korupsi (Khair, 2014). Adanya manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan pengorbanan yang harus dilakukan menjadi alasan oknum tersebut akhirnya memilih untuk melakukan korupsi. Teori utilitarianisme sangat cocok dengan pemikiran ekonomis, karena cukup dekat dengan *Cost-Benefit Analysis*.

Teori Keagenan

Menurut Halim dan Abdullah (2006) teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan hubungan prinsipal dan agen, di mana teori ini berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Teori prinsipal-agen menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak sebagai prinsipal membuat kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit dengan pihak lain (agen) dengan harapan agen akan bertindak seperti yang dikehendaki oleh prinsipal. Pada akhirnya hubungan prinsipal dan agen tersebut menimbulkan munculnya pendelegasian wewenang.

Bergman & Lane (1990) menyatakan bahwa rerangka hubungan prinsipal agen merupakan suatu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen-komitmen kebijakan publik. Pembuatan dan penerapan kebijakan publik berkaitan dengan masalah kontraktual, yakni informasi yang tidak simetris (*asymmetric information*). Furuboten dan Richter dalam Suprayitno (2011) membedakan kondisi bagaimana ketidaksamaan terjadi menjadi dua macam, yaitu *adverse selection* dan *moral hazard*.

Klitgaard (1998) menyebutkan korupsi merupakan monopoli ditambah kelonggaran wewenang (*discretion*) yang besar dikurangi akuntabilitas. Secara matematis, dirumuskan sebagai berikut:

$$C = M + D - A$$

Keterangan:

C = *Corruption* (korupsi)

M = *Monopoly* (monopoli)

D = *Discretion* (kelonggaran wewenang)

A = *Accountability* (akuntabilitas)

Berdasarkan rumus tersebut korupsi terjadi karena pejabat (agen) mempunyai kekuasaan mutlak (*substantial monopoly power*) dalam mengambil keputusan, serta mempunyai kelonggaran wewenang yang besar tanpa didukung dengan adanya pertanggungjawaban yang jelas, dan rendahnya keterbukaan yang dilakukan dalam setiap pengambilan keputusan mereka (Yuliana dan Setyaningrum, 2016).

MICE

MICE merupakan singkatan dari *Money* (uang), *Ideology* (ideologi), *Coercion* (pemaksaan), dan *Ego* (ego). Model MICE merupakan modifikasi dari teori *Fraud Triangle* terutama pada sisi tekanan. Model ini dikemukakan oleh Kranacher *et al.*, pada tahun 2011, menurut mereka motivasi atau tekanan pelaku kecurangan mungkin lebih tepat diperluas dan diidentifikasi dengan akronim MICE (Mujib, 2017).

Korupsi

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mendefinisikan korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat setidaknya tiga puluh bentuk tindak pidana korupsi. Kemudian, dari ketiga puluh bentuk tersebut dikelompokkan menjadi tujuh kelompok, yaitu: perbuatan yang merugikan negara, suap-menyuap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan benturan kepentingan dalam pengadaan.

Terdapat banyak faktor penyebab terjadinya korupsi di Indonesia. Tanzi (1998) mengelompokkan faktor penyebab korupsi menjadi dua, yaitu penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Faktor penyebab langsung memuat sedikitnya enam faktor, yaitu 1) otorisasi dan pengaturan, 2) perpajakan, 3) kebijakan pengeluaran atau anggaran, 4) penyediaan barang dan jasa di bawah harga pasar, 5) kebijakan diskresi lainnya, dan 6) pembiayaan partai politik. Sedangkan, faktor penyebab tidak langsung tindak korupsi terdiri dari, yaitu 1) kualitas birokrasi, 2) besaran gaji di sektor publik, 3) sistem hukuman, 4) pengawasan institusi, 5) transparansi aturan, hukum, dan proses, dan 6) teladan pimpinan.

Opini Audit

Menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan dan tanggung jawab keuangan negara, opini didefinisikan sebagai pernyataan profesional sebagai bentuk kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Terdapat empat kriteria yang menjadi dasar pemberian opini audit oleh BPK RI, yaitu a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), c) kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan d) efektivitas sistem pengendalian intern. Berdasarkan Buletin Teknis (Bultek) 01 Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) tentang Pelaporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah paragraf 13 tentang jenis opini. Terdapat empat jenis opini audit yang dapat diberikan oleh pemeriksa BPK RI, yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/*Unqualified opinion*), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP/*Qualified opinion*), 3) Opini Tidak Wajar (TW/*Adverse opinion*), Opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP/*Disclaimer opinion*).

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem pengendalian intern pemerintah merupakan sistem pengendalian intern yang diselenggarakan di lingkungan pemerintahan, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pengawasan intern mengacu pada keseluruhan proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Secara umum tujuan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yaitu untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Transparansi diartikan sebagai pemberian informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Hal penting untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme harus memenuhi salah satunya asas keterbukaan. Asas keterbukaan yang dimaksud, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memerhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara (Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999).

Perumusan Hipotesis

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas kinerja yang terjadi selama satu periode. Hal itu selaras dengan teori keagenan bahwa pemerintah sebagai agen berkewajiban mempertanggungjawabkan amanah yang diterimanya kepada pemberi amanah (prinsipal) dengan cara menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitasnya (Mardiasmo, 2009). Tolok ukur untuk menilai sudah wajar atau belumnya laporan keuangan yang telah dibuat pemerintah daerah dilihat dari perolehan opini audit dari BPK RI. Semakin wajar laporan keuangan yang dibuat pada akhirnya memperkecil pula kemungkinan adanya kecurangan atau korupsi. Hingga secara tidak langsung pencapaian opini yang semakin baik berdampak memperkecil kemungkinan korupsi yang terjadi. Hal ini didukung oleh Aminah dan Tarmizi (2013), Kurniawan (2009), Khairudin dan Erlanda (2016), dan Avalon *et al.*, (2018) yang menyatakan bahwa opini audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kasus korupsi.

H1: Opini audit berpengaruh terhadap kasus korupsi di daerah

Teori keagenan berkaitan erat dengan adanya kewenangan yang besar yang dimiliki agen. Selaras dengan itu teori utilitarianisme merupakan teori tentang motivasi individu dalam bertindak yang didasarkan pada pertimbangan manfaat dan pengorbanan yang telah dilakukan (Khair, 2014). Pada banyak kasus, pihak agen yang dalam hal ini pemerintah sering kali termotivasi untuk memaksimalkan utilitas yang ia miliki, hingga pada akhirnya menimbulkan asimetri informasi dan terjadilah korupsi. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meminimalkan adanya asimetri informasi dengan melakukan pengawasan dan pembagian tanggung jawab yang jelas antar-pegawai (sistem pengendalian intern). Penelitian yang dilakukan Nurhasanah (2016) dan Ge *et al.*, (2014) menyatakan bahwa efektivitas pengendalian intern berpengaruh dalam menurunkan kasus korupsi.

H2: Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kasus korupsi di daerah

Penyajian laporan keuangan adalah salah satu bentuk akuntabilitas keuangan yang dilakukan pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan yang telah dilakukan. Adanya transparansi yang dilakukan merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi adanya asimetri informasi dalam kaitannya dengan teori keagenan. Semakin transparan pemerintah dalam mengungkapkan LKPD yang dimilikinya maka kepercayaan masyarakat semakin tinggi bahwa pemerintah telah menggunakan wewenang yang diamanahkan dengan sebaik-baiknya. Tingginya kepercayaan masyarakat merujuk pada rendahnya kemungkinan kecurangan (korupsi) yang dilakukan oleh pemerintah. Jika ditarik kesimpulan maka semakin transparan pemerintah daerah dalam mengungkapkan informasi LKPD maka berdampak pada semakin kecilnya kasus korupsi yang mungkin terjadi.

H3: Transparansi laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kasus korupsi di daerah

METODOLOGI PENELITIAN

Data dan Sampel

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kausal dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa data opini audit, sistem

pengendalian intern pemerintah, transparansi, dan kasus korupsi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumenter. Teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini dengan mencari data sekunder berupa data kasus korupsi, IHPS, dan mengamati *website* pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini mencakup semua pemerintah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2016-2018, yaitu sebanyak 1542 pemerintah daerah (514×3 tahun). Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini diambil berdasarkan metode *purposive sampling*. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pemerintah kabupaten/kota tahun 2016-2018 di Indonesia
- 2) Pemerintah kabupaten/kota yang diaudit oleh BPK RI pada tahun 2016-2018 dan tertuang dalam IHPS
- 3) Pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyajikan data untuk pengukuran variabel yang diteliti dalam penelitian ini

Berdasarkan kriteria pengambilan sampel tersebut, maka jumlah sampel dalam penelitian ini seperti pada tabel 3.

Tabel 3. Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah kabupaten/kota di Indonesia	514
2	Jumlah kabupaten/kota yang ada pada IHPS	508
3	Jumlah kabupaten/kota yang tidak memuat data yang dibutuhkan	(380)
4	Jumlah pengamatan pertahun	128
Total Sampel Selama Tahun Penelitian (2016-2018)		384

Definisi dan Pengukuran Variabel

Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kasus korupsi di daerah. Pengukuran kasus korupsi yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan Wulandari (2015), yaitu memodifikasi data kasus korupsi yang terjadi di pemerintah daerah terkhusus kabupaten/kota di Indonesia. Data tersebut diperoleh dari Laporan Tahunan KPK yang dipublikasikan pada *website* resmi KPK RI. Pada penelitian ini peneliti mengukur variabel kasus korupsi dengan menggunakan variabel *dummy*, yaitu terkait ada atau tidaknya kasus korupsi di daerah. Adapun pemberian skornya dilakukan dengan memberi skor 0 jika tidak terdapat korupsi dan skor 1 jika ada korupsi.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah opini audit, sistem pengendalian intern pemerintah, dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. Merujuk pada penelitian yang dilakukan Khairudin dan Erlanda (2016) pengukuran opini audit LKPD pada penelitian ini diukur menggunakan skala ordinal 1 sampai 4. Pemberian skor 1 sampai 4 dilihat dari capaian opini audit LKPD masing-masing daerah kabupaten/kota yang mengacu pada IHPS yang telah di *download* dari *website* resmi BPK RI. Diberikan skor 4 apabila memperoleh opini WTP, skor 3 apabila memperoleh opini WDP, Skor 2 apabila memperoleh opini TW, dan skor 1 apabila memperoleh opini TMP. Kemudian, sistem pengendalian intern pemerintah dalam penelitian ini di ukur dengan banyaknya jumlah kasus kelemahan sistem pengendalian intern yang dilaporkan BPK RI dalam IHPS dengan menetapkan skala ordinal sebagai berikut (Budiawan dan Purnomo, 2014):

Tabel 4. Skala Penafsiran Sistem Pengendalian Intern

Jumlah Temuan	Skor
0-7	4
8-15	3
16-22	2
≥ 22	1

Pengukuran transparansi dalam penelitian ini mengacu pada banyaknya informasi yang dipublikasikan pemerintah daerah melalui *website* yang dimiliki. Terdapat enam kriteria yang digunakan dalam mengukur transparansi, hal ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Aminah dan Tarmizi (2013). Keenam kriteria tersebut adalah sebagai berikut: 1) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran, 2) Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses, 3) Tersedia laporan pertanggungjawaban pemerintah, 4) Terakomodasinya suara/usulan rakyat, 5) Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik, dan 6) Informasi lainnya yang dipublikasikan pemerintah daerah terkait aktivitas penting lainnya. Berdasarkan indikator tersebut, penelitian ini menggunakan pengukuran transparansi dengan skala ordinal 1 sampai 4

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik. Dalam hal ini, analisis regresi logistik tidak mensyaratkan variabel independen yang diteliti memiliki distribusi normal. Sehingga tidak perlu dilakukan asumsi normalitas data pada variabel independen. Data diolah menggunakan *software* SPSS versi 23. Tahapan-tahapan analisis regresi logistik yang digunakan meliputi statistik deskriptif dan pengujian hipotesis. Analisis statistik deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk memberikan deskripsi umum terhadap objek yang diteliti dilihat dari rata-rata, standar deviasi, dan maksimum-minimum (Ghozali, 2013). Sedangkan, pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan *Maximum Likelihood Estimation* (MLE) sebagai estimasi parameter yang digunakan. Penelitian ini menggunakan besaran nilai $\alpha = 5\%$. Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis didasarkan pada besarnya nilai signifikansi p-value sebagai berikut:

- 1) Jika nilai signifikansi (sig.) $< \alpha = 5\%$ maka hipotesis diterima.
- 2) Jika nilai signifikansi (sig.) $> \alpha = 5\%$ maka hipotesis ditolak.

Sebelum sampai pada penerimaan dan penolakan hipotesis, terdapat beberapa tahapan proses yang perlu dilewati, yaitu: 1) menilai keseluruhan model, 2) koefisien determinasi, 3) menguji kelayakan model regresi, 4) uji multikolinearitas, 5) matriks klasifikasi, dan persamaan regresi yang dinyatakan sebagai berikut:

$$\text{KOR} = \alpha + \beta_1(\text{OP}) + \beta_2(\text{SPIP}) + \beta_3(\text{TPS}) + \epsilon$$

Keterangan:

KOR	= Kasus Korupsi
OP	= Opini Audit
SPIP	= Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
TPS	= Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
α	= Konstanta
$\beta_1 - \beta_4$	= Koefisien Regresi
ϵ	= Koefisien <i>Error</i>

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Hasil pengujian statistik deskriptif atas variabel penelitian disajikan pada tabel.

Tabel 5. Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Standard Deviation
OP	384	1,00	4,00	3,70	0,62
SPIP	384	1,00	4,00	3,73	0,54
TPS	384	1,00	4,00	2,77	1,13

Keterangan: OP = Opini audit, SPIP = Sistem pengendalian intern pemerintah, TPS = Transparansi

Tabel 4 menunjukkan hasil analisis statistik deskriptif sebagai berikut:

- Hasil analisis statistik deskriptif terhadap opini audit berdasarkan tabel 5 menunjukkan nilai minimum 1, nilai maksimum 4. nilai rata-rata sebesar 3,70, dan standar deviasi sebesar 0,62. Nilai rata-rata 3,70 menunjukkan opini audit yang telah diterima kabupaten/kota kebanyakan mendapat opini diatas WDP atau dengan kata lain sudah banyak yang mendapat opini WTP.
- Hasil analisis statistik deskriptif terhadap SPIP berdasarkan tabel 5 menunjukkan nilai minimum 1, nilai maksimum 4. nilai rata-rata sebesar 3,73, dan standar deviasi sebesar 0,54. Nilai rata-rata 3,73 menunjukkan banyaknya kelemahan SPI yang terjadi pada kabupaten/kota berada pada rentang 0 sampai sampai dengan 10.
- Hasil analisis statistik deskriptif terhadap transparansi berdasarkan tabel 5 menunjukkan nilai minimum 1, nilai maksimum 4. nilai rata-rata sebesar 2,77, dan standar deviasi sebesar 1,13. Nilai rata-rata 2,77 menunjukkan transparansi kabupaten/kota masih berkisar diantara 4 sampai 5 dari 6 indikator yang menjadi alat ukur transparansi.

Hasil Pengujian Hipotesis

Uji Kesesuaian Keseluruhan Model

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai initial -2 Log Likelihood (-2LL) awal yang dapat dilihat pada bagian *Block 0: Beginning Block*. Kemudian, dibandingkan dengan nilai -2LL akhir yang dapat dilihat pada bagian *Block 1: Method = Enter*.

Tabel 6. *Iteration History* Awal

Iteration	-2 Log Likelihood
Step 0	339,518

Berdasarkan hasil analisis menggunakan SPSS yang ditunjukkan pada tabel 6 diperoleh hasil besarnya nilai -2LL awal adalah 339,518. Jika dibandingkan dengan alpha 5% maka angka tersebut signifikan dengan alpha. Hal ini berarti sebelum peneliti memasukkan variabel independen pada model regresi yang ada, hanya konstanta yang tidak fit dengan data (Wulandari, 2015).

Tabel 7. *Iteration History* Akhir

Iteration	-2 Log Likelihood
Step 1	334,840

Berdasarkan tabel 7 menunjukkan penurunan nilai terjadi dari -2LL awal sebesar 339,518 menjadi -2LL akhir sebesar 334,840 dan terjadi selisih sebesar 4,678. Penurunan yang terjadi pada -2LL diartikan bahwa dengan ditamhakkannya variabel independen ke dalam model regresi dapat memperbaiki model fit sehingga merujuk pada regresi yang lebih baik atau dengan kata lain model yang telah dihipotesiskan fit dengan data.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 8. Koefisien Determinasi

	<i>Cox & Snell R Square</i>	<i>Nagelkerke R Square</i>
Step 1	0,012	0,021

Berdasarkan tabel 8, besarnya nilai *Cox & Snell R Square* adalah 0,012 yang dapat diartikan bahwa besarnya kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen adalah 0,012 atau 1,2%. Tabel 7 juga menunjukkan besarnya nilai *Nagelkerke R Square* adalah 0,021 yang bermakna bahwa variabel independen yang menjelaskan variabel dependen yaitu sebesar 0,021 atau 2,1%. Sisanya sebesar 97,9% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model yang ada dalam penelitian ini.

Hasil Uji Kelayakan Model Regresi

Tabel 9. *Hosmer and Lemeshow Test*

	<i>Chi Square</i>	<i>Degree of Freedom</i>	<i>Signifikansi</i>
Step 1	6,478	7	0,485

Berdasarkan tabel 9 menunjukkan besarnya nilai signifikansi pada tabel *Hosmer and Lemeshow Test* adalah 0,485. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dibandingkan dengan alpha 0,05, sehingga hal ini dapat diartikan bahwa H_0 diterima. Penerimaan H_0 berarti bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga model ini dapat digunakan untuk melakukan analisis selanjutnya.

Hasil Uji Multikolinearitas

Cara untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara variabel independen dengan mengamati besarnya nilai koefisien korelasi yang terdapat pada tabel *correlation matrix*.

Tabel 10. Hasil Uji Multikolinearitas

Step 1	Constant	Keterangan
OP	-0,539	Tidak Ada Gejala Multikolinearitas
SPIP	-0,811	Tidak Ada Gejala Multikolinearitas
TPS	-0,216	Tidak Ada Gejala Multikolinearitas

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dilihat bahwa tidak ada nilai koefisien korelasi yang melebihi nilai sebesar 0,10. Sehingga dapat disimpulkan tidak ada gejala multikolinearitas yang serius terjadi antara variabel independen.

Matriks Klasifikasi

Cara untuk mengetahui kekuatan prediksi pada model regresi dengan mengamati seberapa besar nilai *Overall Percentage* yang terdapat pada *Classification Table*.

Tabel 11. Matriks Klasifikasi

	Tidak ada Korupsi	Ada Korupsi	Percentage Correct
Tidak ada Korupsi	322	0	100%
Ada Korupsi	62	0	0%
Overall Percentage			83,9%

Berdasarkan tabel 11 menunjukkan besarnya nilai *Overall Percentage* adalah sebesar 83,9 atau 83,9%. Hal ini bermakna bahwa kekuatan prediksi model regresi dalam penelitian ini mampu

memprediksi kemungkinan kabupaten/kota korupsi sebesar 0,839 atau 83,9%.

Uji Koefisien Regresi Logistik

Tabel 12. Uji Koefisien Regresi Logistik

	Koefisien Regresi (B)	Wald	Signifikansi (Sig.)
Konstanta	-1,231	0,892	0,345
Opini Audit	-0,341	2,847	0,092
SPIP	0,056	0,047	0,828
Transparansi	0,216	2,790	0,095

Berdasarkan tabel 12 di peroleh nilai koefisien regresi (B) masing-masing variabel yaitu opini audit -0,341, spip 0,056, transparansi 0,216, dan konstanta -1,231. Model regresi yang terbentuk dari hasil pengujian tersebut adalah sebagai berikut:

$$KOR = -1,231 - 0,341 OP + 0,056 SPIP + 0,216 TPS + Error$$

Hasil-hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel independen nilainya lebih besar dari alpha 0,05 sehingga H_0 variabel independen tidak didukung. Hal ini berarti baik variabel opini audit, sistem pengendalian intern pemerintah, maupun transparansi tidak berpengaruh terhadap kasus korupsi di daerah

Berdasarkan tabel 12 menunjukkan besarnya tingkat signifikansi untuk variabel opini audit adalah 0,092. Nilai tersebut lebih besar dari alpha 0,05 sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini tidak didukung. Hal ini berarti bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap kasus korupsi di daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sitorus dan Rahayu (2018) dan Wulandari (2015). Hal ini tidak selaras dengan teori keagenan bahwa ada konflik kepentingan antara pemerintah (agen) dan masyarakat (prinsipal) berkaitan dengan masalah keuangan dan diperlukan media penengah yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan dengan perolehan opini audit WTP memang menunjukan tingkat akuntabilitas yang baik, namun hal itu masih belum bisa menjamin bahwa tingkat korupsi yang terjadi di daerah rendah. Hal ini karena opini audit yang dikeluarkan oleh BPK dilakukan untuk mengukur apakah laporan keuangan telah disusun secara wajar (tingkat kewajaran) dan sesuai dengan SAP yang ada. Sedangkan kasus korupsi dalam penelitian ini merujuk pada korupsi yang dilakukan oleh bupati/walikota (*Individual Fraud*). Sehingga, kasus korupsi yang terjadi tidak terkait langsung dengan proses audit yang dilakukan BPK karena merupakan kecurangan individu bukan kecurangan manajemen sehingga hal tersebut yang membuat kasus korupsi tidak terjamah. Oleh karena itu pencapaian opini audit tidak berpengaruh terhadap kasus korupsi di daerah. Heriningsih dan Marita (2013) juga menyebutkan opini audit opini dari BPK hanya dijadikan sebagai media pengukuran kinerja dari pihak eksternal dalam mengelola keuangan, sehingga hal itu yang menjadikan pemerintah daerah berlomba-lomba untuk memperoleh predikat WTP.

Berdasarkan tabel 12 menunjukkan besarnya tingkat signifikansi untuk variabel sistem pengendalian intern pemerintah adalah 0,828. Nilai tersebut lebih besar dari alpha 0,05 sehingga hipotesis ke-dua dalam penelitian ini tidak didukung. Hal ini berarti bahwa sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh terhadap kasus korupsi di daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wibisono (2017) dan Wulandari (2015). Hasil penelitian ini selaras dengan dengan asumsi tentang sifat manusia pada teori keagenan dan didukung teori utilitarianisme, bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*) serta keinginan untuk memaksimalkan utilitas yang dimiliki (Lukfiarini, 2018). Kasus korupsi yang terjadi oleh kepala daerah merupakan karena kecenderungan sifat manusia untuk mengutamakan diri sendiri (*self interest*) yang merujuk pada kecurangan individu. Hal tersebut yang menjadi salah satu dasar meskipun sistem pengendalian intern sudah baik, penyelewengan dan penyalahgunaan sumber daya publik (kasus korupsi) masih sering terjadi pada pemerintah daerah. Alasan lainnya adalah

karena penelitian ini mengukur sistem pengendalian intern pemerintah dengan banyaknya kasus kelemahan sistem pengendalian intern yang terdapat pada IHPS. Baiknya sistem pengendalian intern pemerintah dalam penelitian ini tidak mengindikasikan tanpa kelemahan, tetapi memiliki kelemahan sistem pengendalian intern yang relatif lebih sedikit yaitu berkisar 1 sampai 10 (statistik deskriptif). Sehingga, penelitian ini belum mampu membuktikan bahwa semakin sedikit kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah yang merujuk pada sistem pengendalian intern pemerintah yang lebih baik berpengaruh signifikan terhadap kasus korupsi di daerah.

Berdasarkan tabel 12 menunjukkan besarnya tingkat signifikansi untuk variabel transparansi adalah 0,095. Nilai tersebut lebih besar dari alpha 0,05 sehingga hipotesis ke-tiga dalam penelitian ini tidak didukung. Hal ini berarti bahwa transparansi laporan keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kasus korupsi di daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khairudin dan Erlanda (2016) dan Sitorus dan Rahayu (2018). Masyarakat berkaitan dengan teori keagenan berperan sebagai prinsipal yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengelola dan mengatur sumber daya keuangan yang dimiliki atau telah diamanahkan. Sejalan dengan itu masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi tentang bagaimana jalannya pemerintahan yang akan dan telah dilakukan (transparansi). Namun penelitian ini menunjukkan hal yang tidak selaras, bahwa transparansi laporan keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap semakin rendahnya kasus korupsi di daerah. Hal ini dengan alasan transparansi yang dilakukan pada *website* masing-masing pemerintah daerah berkaitan dengan permasalahan manjerial ataupun tanggung jawab pemerintahan terkait secara menyeluruh. Pada sisi lain permasalahan korupsi yang terjadi di daerah yang dilakukan kepala daerah merupakan kecurangan yang dilakukan atas dasar individu (*Individual Fraud*). Oleh karena itu meskipun transparansi LKPD yang dilakukan sudah relatif baik kasus korupsi terkadang masih ditemukan dalam pemerintah daerah terkait dan transparansi LKPD tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap kasus korupsi di daerah.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji opini audit, SPIP dan transparansi terhadap kasus korupsi di daerah. Hasil pengujian atas hipotesis yang telah disusun menunjukkan opini audit, SPIP, dan transparansi tidak berpengaruh terhadap kasus korupsi di daerah. Apabila dikemudian hari akan dilakukan penelitian serupa, diharapkan dapat menambahkan variabel independen lain seperti etika perilaku dan bisa melakukan penelitian kualitatif. Hal tersebut dengan tujuan agar dapat memberikan gambaran yang lebih baik terkait faktor-faktor yang diteliti.

REFERENSI

- Adzkia, A. (2018, Desember 30). Korupsi di daerah dalam rekor KPK sepanjang 2018. *Beritagar Online*. Diakses dari: <https://www.beritagar.id/>
- Avalon, Y., Achsani, N.A., & Hardiyanto, A.T. (2018). Keterkaitan antara opini BPK dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*. Vol1 No 5.
- Aminah, & Tarmizi, R. (2013). *Penerapan Good Governance pada Pemerintah Daerah Se-Indonesia*. Lampung: Skripsi Universitas Bandar Lampung.
- Bergman, M., & Lane, J.-E. (1990). Public Policy in a Principal Agent Framework. *Journal of Theoretical Politics*, Vol 2 (3). 339-352.
- BPK RI. (2016). *Ikhtisar hasil pemeriksaan Semester I BPK RI*. Jakarta. Diakses dari: <https://www.bpk.go.id/>
- _____. (2016). *Ikhtisar hasil pemeriksaan Semester II BPK RI*. Jakarta. Diakses dari: <https://www.bpk.go.id/>
- _____. (2017). *Ikhtisar hasil pemeriksaan Semester I BPK RI*. Jakarta. Diakses dari: <https://www.bpk.go.id/>

- _____. (2017). *Ikhtisar hasil pemeriksaan Semester II BPK RI*. Jakarta. Diakses dari: <https://www.bpk.go.id/>
 - _____. (2018). *Ikhtisar hasil pemeriksaan Semester I BPK RI*. Jakarta. Diakses dari: <https://www.bpk.go.id/>
 - _____. (2018). *Ikhtisar hasil pemeriksaan Semester II BPK RI*. Jakarta. Diakses dari: <https://www.bpk.go.id/>
 - _____. (2019). *Ikhtisar hasil pemeriksaan Semester I BPK RI*. Jakarta. Diakses dari: <https://www.bpk.go.id/>
- Brusca, I., Natalia, Rossi, F., & Aversano, N. (2018). Accountability and Transparency to Fight against Corruption: An International Comparative Analysis. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, 20:5, 486-504, DOI: 10.1080/13876988.2017.1393951.
- Budiawan, D. A., & Purnomo, B. S. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kekuatan Koersif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah I Bogor Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 2 (1).
- Fizriani, W. (2018, September 24). IAI Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Rendah. *Republika Online*. Diakses dari <https://www.republika.co.id/>
- Gerintya, S. (2018, April 12). Dalam 13 tahun, 56 Kepala Daerah jadi terpidana Korupsi. *Surat Kabar Online Tirto*. Diakses dari <https://www.tirto.id/>
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal akuntansi Pemerintahan*, Vol. 2. No. 1.
- Heriningsih, S., & Marita. (2013). Pengaruh Opini Audit Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa). *Buletin Ekonomi*. Vol. 11, No. 1.
- Khair, M. N. (2014). *Analisis Pola Korupsi Di Lembaga Pemerintah Indonesia (Studi kasus putusan Incracht tindak pidana korupsi di lembaga pemerintah tahun 2005-2013)*. Semarang: Skripsi Universitas Diponegoro.
- Khairudin, & Erlanda, R. (2016). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Se-Sumatera). *Jurnal Akuntansi & Keuangan*. Vol. 7, No. 2.
- KPK. (2015). Analisis Audit BPK RI Terkait Kelemahan SPI, Temuan Ketidapatuhan Dan Kerugian Negara. *Riset Publik*. Diakses dari: <https://acch.kpk.go.id/id/>
- _____. (2016). *Laporan Tahunan KPK Indonesia tahun 2018*. Jakarta: KPK. Diakses dari: <https://www.kpk.go.id>
- _____. (2017). *Laporan Tahunan KPK Indonesia tahun 2018*. Jakarta: KPK. Diakses dari: <https://www.kpk.go.id>
- _____. (2018). *Laporan Tahunan KPK Indonesia tahun 2018*. Jakarta: KPK. Diakses dari: <https://www.kpk.go.id>
- Klitgaard. (1998). International Cooperation Against Corruption. *Journal Finance and Development*, Vol. 35, No.1: 3-6.
- Kurniawan, T. (2009). Peranan Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*. Vol.

16, No. 2.

- Mardiasmo. (2010). Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* Vol. 2, No. 1.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Masyitoh, R. D., Wardhani, R., & Setyaningrum, D. (2015). Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Persepsi Korupsi pada Pemerintah Daerah Tingkat II Tahun 2008-2010. *Simposium Nasional Akuntansi 18 Universitas Sumatera Utara, Medan 16-19*
- Mujib, A. (2017). Syari'ah Fraud Model: Sebuah Konsep Dasar. *Simposium Nasional Akuntansi, Jember*.
- Nugroho, H. (2016). Efektivitas Koordinasi dan Supervisi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh KPK. *Riset Percepatan Guru Besar dengan Nomor Kontrak: 2540.08/UN23.10/PN/2013*.
- Nurhasanah. (2016). Efektivitas Pengendalian Internal, Audit Internal, Karakteristik Instansi dan Kasus Korupsi (Studi Empiris Di Kementerian/Lembaga). *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara, Vol 1 No 1*.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- _____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- _____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Petrovits, C., Shakespeare, C., & Shih, A. (2011). The Causes and Consequences of Internal Control Problems in Nonprofit Organizations. *The Accounting Review, Vol 86, Issue 1*.
- Prawira, A. (2018, Agustus 16). Mendagri Sebut Korupsi di Indonesia Sudah Akut. *Sindonews*. Diakses dari: <https://nasional.sindonews.com/>
- Putera, A. D. (2018, September 20). Sri Mulyani: Banyak Laporan Keuangan Daerah WTP, tapi Kepala Daerahnya Korupsi. *Kompas Online*. Diakses dari <https://www.kompas.com/>
- Redaksi Editorial. (2018, September 30). Korupsi dan Transparansi Laporan Keuangan Parpol. *Satu Harapan Online*. Diakses dari: <http://www.satuharapan.com/>
- Salle, A. (2016). Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*
- Scott, W. R. (1997). *Financial Accounting Theory*. International Edition. New Jersey: Prentice-Hall, Inc
- Setiawan, W. (2012). *Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Lkpd) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Semarang: Skripsi Universitas Diponegoro.
- Sitorus, C. P., & Rahayu, S. (2018). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Tingkat Korupsi (Studi pada Pemerintah Daerah di Indonesia yang Disurvei oleh KPK di Tahun 2013). *e-Proceeding of Management: Vol.5, No.2*.
- Suprayitno, B. (2011). Desentralisasi Fiskal dan Korupsi: Fakta dalam otonomi daerah di Indonesia. Yogyakarta: Tesis Universitas Gajah Mada.

- Tanzi, V. (1998). *Corruption Around The World: Causes, Consequences, Scope, and Cures*. IMF Staff Papers, Vol. 45, No. 4.
- Vadlamannati, K. C., & Cooray, A. (2016). Transparency Pays? Evaluating the Effects of the Freedom of Information Laws on Perceived Government Corruption. *The Journal of Development Studies*. DOI: 10.1080/00220388.2016.1178385.
- Wulandari, R. (2015). *Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Kinerja Keuangan pemerintah Daerah terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Yuliyana, I., & Setyaningrum, D. (2016). Pengaruh Penerapan E-Government dan Akuntabilitas terhadap Persepsi Korupsi di Kementerian/Lembaga. Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung.